

TRANSISI DEMOGRAFI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Siswanto Agus Wilopo**

Abstract

From a number of studies there are evidences of the existence of integration between "demography variables" and the development process. In this case it is important to understand that the population policies have been formulated for the continuity of development process, mainly by paying attention to the integration between people (inhabitants) and their environment. In this case, the government's policy is to stabilize economic development, distributing it evenly and maintain the environment in accordance with the global Population Action Program. The problems caused by changes related to the demographic transition can be considered the material for the future demographic policies.

Pengantar

Penduduk dunia mengalami perubahan yang sangat drastis selama dua dasawarsa terakhir ini. Perubahan ini terjadi sebagai hasil upaya nasional dan internasional dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Meskipun demikian, masih sekitar empat perlima penduduk dunia hidup di negara sedang berkembang. Dari 5,716 miliar penduduk dunia, hanya 1,166 miliar tinggal di negara yang sudah maju dan masih sekitar 4,550 miliar penduduk dunia hidup di

negara yang sedang berkembang (UN, 1994).

Masalah utama yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang tidak hanya masalah ekonomi yang terbelenggu dalam tatanan lingkungan ekonomi dunia yang cenderung merugikan. Sebagian besar negara-negara sedang berkembang juga mengalami permasalahan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, pengurusan sumber daya alam dan persediaan makanan, pengrusakan

* Makalah ini merupakan penyempurnaan kertas kerja yang pernah dipresentasikan oleh penulis pada Scminar Sehari Strategi Implementasi Program Aksi Kependudukan Kairo 1994 dan Pelantikan Pengurus IPADI Cabang DKI Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 1994 di Jakarta.

** Dr. Siswanto Agus Wilopo, S.U., M.Sc, Sc.D adalah staf pengajar jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan pada saat ini diperbantukan pada Kantor Menteri Negara Kependudukan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk.

lingkungan alam, dan diperberat dengan perubahan pola konsumsi penduduk yang tidak seimbang dengan produksinya. Terjadinya permasalahan ekologi baru, seperti peningkatan suhu bumi (*global warming*), yang berkaitan erat dengan ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi, menimbulkan ancaman baru bagi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Secara bersamaan, dalam dua dasawarsa terakhir ini pula telah terjadi perubahan ciri-ciri demografis penduduk dunia, antara lain berupa penambahan jumlah, perubahan struktur dan komposisinya. Pertumbuhan penduduk di beberapa negara sedang berkembang telah mengalami penurunan, meskipun masih lebih tinggi dibanding negara-negara yang sudah maju. Pelonjakan jumlah penduduk yang terjadi pada saat angka mortalitas menurun lebih awal dan lebih cepat dibanding fertilitas mulai mengalami stabilisasi, karena semakin banyak negara yang angka fertilitasnya telah menurun mendekati *replacement level*. Akibatnya angka laju pertumbuhan penduduk dunia mengalami penurunan. Walaupun demikian, penduduk dunia akan tetap meningkat dengan cepat. Menjelang abad ke duapuluh satu ini, penambahan penduduk justru mulai meningkat dengan pesat. Hal ini karena masih banyak negara-negara yang sedang berkembang mempunyai angka fertilitas yang cukup tinggi dan penduduknya lebih didominasi oleh anak-anak, remaja dan usia reproduktif sehingga jumlah kelahiran akan lebih

tinggi dibanding dengan jumlah kematian. Oleh sebab itu penduduk dunia akan bertambah terus, sehingga saat ini diperkirakan telah menjadi 5,716 miliar.

Masalahnya ialah bagaimana dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat tersebut dapat tercukupi segala kebutuhan hidupnya dengan tanpa mengorbankan kepentingan generasi anak cucunya. Misalnya, bagaimana menjamin kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang ada dan terjangkau oleh mereka dan anak cucu mereka di kemudian hari. Untuk itu, pola pembangunan harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan agar umat manusia di bumi akan tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin maju. Dalam pembangunan yang demikian, maka orientasi permasalahan dan tantangan kependudukan di masa depan akan menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Tulisan ini akan membahas konsep dasar terjadinya proses transisi demografi dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan menganalisa pola transisi demografi dan mengkaitkan dengan tujuan dan pelaksanaan pembangunan yang disepakati bersama, termasuk dalam Program Aksi Kependudukan hasil Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan di Kairo, akan dibahas beberapa kebijaksanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Konsep Transisi Demografi dan Pembangunan Berkelanjutan - Konsep Transisi Demografi

Pada pembicaraan konsep transisi demografi, penekanan pokok terletak pada aspek pertumbuhan penduduk, dan keterangan lengkap umumnya diarahkan pada proses penurunan fertilitas. Dengan demikian pembicaraan konsep proses transisi demografi umumnya difokuskan pada perubahan jumlah, struktur dan komposisi penduduk yang mengalami perubahan selama proses transisi berlangsung.

Pembicaraan proses transisi demografi umumnya hanya terpusatkan pada pembicaraan proses penurunan fertilitas. Padahal proses transisi demografi tidak hanya menyangkut perubahan tingkat fertilitas, tetapi mencakup pula perubahan tingkat morbiditas dan mortalitas. Hubungan antara transisi demografi dengan penurunan mortalitas kurang memperoleh perhatian yang sepadan. Baru setelah Omran (1971) mengajukan konsep *transisi epidemiologi*, perubahan pola mortalitas yang terkait dengan transisi demografi mulai memperoleh perhatian yang selengkap-lengkapnya.

Penurunan fertilitas umumnya terjadi setelah penurunan mortalitas. Meskipun demikian, penurunan tingkat fertilitas telah berjalan sebelum ditemukannya teknologi modern untuk mencegah konsepsi. Sebelum teknologi kontrasepsi modern ditemukan, penundaan usia kawin, membujang, sanggama terputus, dan abortus tak legal diduga menjadi faktor penyebab utama menurunnya

fertilitas. Beberapa faktor tersebut sangat erat kaitannya dengan tradisi sosial dan budaya setempat.

Menurunnya angka kelahiran dan kematian serta meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir menjadi ciri pokok berlangsungnya proses transisi demografi. Konsep transisi demografi baru diperkenalkan oleh Notestein tahun 1953. Banyak definisi yang disampaikan oleh berbagai ahli, tetapi definisi transisi demografi yang paling mudah dimengerti ialah menurut Demeny, (1968).

"Pada masyarakat tradisional tingkat fertilitas dan mortalitas tinggi. Pada masyarakat modern, tingkat fertilitas dan mortalitas rendah. Antara kedua keadaan tersebut disebut transisi demografi".

Dari definisi tersebut terlihat bahwa secara konsep definisi tersebut dapat dimengerti dengan mudah, tetapi kelemahan utama terletak pada operasionalisasi pengertian masyarakat tradisional atau modern dan pengertian tingkat fertilitas/mortalitas tinggi atau rendah.

Perlu dicatat bahwa transisi demografi merupakan proses yang dinamis dari suatu penduduk dalam periode tertentu, tetapi bukan untuk membandingkan keadaan mortalitas dan fertilitas antarpenduduk dalam kurun waktu yang jauh berbeda. Misalnya, pengukuran tingkat fertilitas atau mortalitas yang tinggi atau rendah serta penjabaran masyarakat yang tradisional atau modern dalam abad sembilan belas akan berbeda dengan pada abad kedua puluh satu nanti.

- Kaitan Transisi Demografi dan Pembangunan

Transisi demografi berkaitan dengan proses pembangunan secara langsung atau tidak langsung. Pada awal proses transisi, masih tingginya angka kelahiran akan mempengaruhi pemerataan pembangunan. Pengaruhnya antara lain dapat dilihat melalui 5 aspek berikut ini.

1. Untuk negara yang sedang berkembang, sarana pelayanan kebutuhan penduduk per kapita yang ada masih terbatas, tetapi akan lebih buruk apabila jumlah penduduk semakin meningkat.
2. Penduduk yang kurang berpendidikan dan lebih miskin akan cenderung memiliki anak lebih banyak dibandingkan dengan yang terpenuhi kebutuhannya, sehingga kalau membiarkan mereka dengan jumlah anak tetap tinggi berarti memperberat beban ekonomi, dan bahkan akan memperlebar jurang pemerataan pendapatan antara penduduk miskin dan kaya.
3. Seorang ibu yang lebih sering melahirkan anak akan mempunyai permasalahan kesehatan yang lebih besar, terutama jika akses pelayanan kesehatan masih belum merata.
4. Kesempatan partisipasi wanita dalam pasar kerja dan kegiatan sosial bagi mereka yang lebih sering memiliki anak akan berkurang karena banyak anak berarti memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memelihara anaknya.
5. Penduduk yang besar jumlahnya akan berkaitan dengan pengrusak-

an lingkungan karena ketidakselarasan antara produksi dan konsumsi penduduk yang meningkat dengan cepat.

Meskipun kelima hal tersebut tidak selalu terjadi atau menjadi masalah untuk setiap negara, bagi negara-negara yang sedang berkembang dijadikan alasan pokok untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Dari berbagai studi yang menghubungkan antara pertumbuhan penduduk dengan angka pertambahan penghasilan dan produktivitas tenaga kerja per kapita dapat disimpulkan bahwa untuk periode tahun enam-puluhan sampai dengan tahun tujuh-puluhan tidak menunjukkan hubungan statistik yang bermakna, tetapi sesudah tahun delapan puluhan hubungan tersebut sangat bermakna secara statistik. Hubungan tersebut tetap bervariasi antara negara yang sedang berkembang dan negara yang sudah maju. Bagi negara yang sedang berkembang, semakin tinggi angka laju pertumbuhan penduduknya semakin memperburuk pertumbuhan penghasilan dan produktivitas tenaga kerjanya per kapita. Bagi negara yang sudah maju hubungan tersebut tidak menentu, yaitu dari hubungan negatif sampai dengan hubungan positif.

Perubahan sosial-ekonomi, kultural, dan perilaku wanita menentukan proses penurunan fertilitas, terutama pentingnya faktor sosial dan kultural sebagai faktor penentu pada penerimaan alat kontrasepsi dan keluarga berencana. Studi pertama yang menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor sosial-budaya dengan fertilitas

dilakukan oleh Leisure (1962), yaitu pada waktu ia menulis disertasinya tentang tingkat fertilitas marital di Spanyol sekitar tahun 1910. Dari hasil analisis tentang tingkat fertilitas marital di 49 propinsi di Spanyol, tampak bahwa beberapa propinsi yang mempunyai tingkat fertilitas yang sama cenderung tidak tersebar merata di seluruh Spanyol. Propinsi dengan tingkat fertilitas marital yang sama, pada peta terletak sangat berdekatan satu sama lain dan bahkan membentuk kelompok-kelompok tertentu. Propinsi-propinsi yang memiliki tingkat fertilitas yang sama, banyak yang tidak memiliki kesamaan tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, dan tingkat pendapatannya.

Pada disertasi yang ditulis oleh Leisure (1962), tingkat fertilitas pada peta tidak diberi keterangan apa pun, kecuali format (warna) yang sama untuk propinsi dengan tingkat fertilitas yang sama. Peta tersebut kemudian dibawa pada seorang guru besar bahasa di Universitas Princeton yang mempunyai spesialisasi bahasa Spanyol. Reaksi langsung dari guru besar tersebut ialah bahwa Leisure telah menggambar peta linguistik di Spanyol. Ternyata pada saat Spanyol dibagi menjadi daerah administratif (propinsi) oleh kantor statistik di sana, salah satu alasannya ialah dibagi menurut kerajaan (dahulu Spanyol terdiri dari beberapa kerajaan), perbedaan dialek bahasa, dan tradisi yang mereka miliki. Ini merupakan bukti pertama bahwa dalam masyarakat tradisional pun tingkat fertilitas terkait dengan perkembangan sosial dan budaya setempat.

Perubahan perilaku reproduksi tersebut bersamaan dengan terjadinya perubahan masyarakat tani tradisional menjadi masyarakat industri. Sebelum terjadi transisi fertilitas, umumnya seorang wanita memiliki anak lebih dari enam, dan umumnya mereka tidak memakai alat kontrasepsi. Sebagai kontras pada masyarakat industri, seorang wanita umumnya memiliki dua anak dan memakai kontrasepsi, serta sebagian kecil pernah melakukan pengguguran kandungan. Hal ini membuktikan bahwa selama modernisasi, peningkatan praktek kontrasepsi merupakan penyebab terjadinya transisi fertilitas di masyarakat industri. Bukti ini diulangi lagi oleh beberapa negara yang sedang berkembang, yang telah sukses dalam program keluarga berencana dan mengalami penurunan fertilitas yang cepat.

Di samping alat kontrasepsi, beberapa faktor lain ikut menentukan tingkat dan pola fertilitas. Misalnya, pada masa premodernisasi, praktik menyusui dan pantang berkala selama menyusui menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat fertilitas. Pada awal modernisasi, pola menyusui dan pantang berkala selama menyusui cenderung akan ditinggalkan sehingga mendorong terjadinya peningkatan fertilitas. Tanpa adanya upaya pencegahan penurunan pola menyusui dan promosi pemakaian kontrasepsi, maka tingkat fertilitas tidak akan mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan dengan sejarah pada masa premodernisasi.

Pada masyarakat yang masih tradisional, pola reproduksinya sangat tergantung pada tingkat fertilitas

natural. Istilah fertilitas natural dipakai untuk memberikan ukuran fertilitas pada populasi yang tidak mengenal kontrasepsi. Hampir semua negara sedang berkembang sampai dengan pertengahan abad ini tergolong memiliki fertilitas natural. Jumlah anak yang pernah dilahirkan rata-rata masih di atas tujuh, dan sekitar seperlimanya tidak sampai usia lima tahun sehingga jumlah yang hidup masih tetap di atas rata-rata wanita di negara telah berkembang.

Angka kelahiran baru mengalami penurunan secara mencolok selama tiga dasawarsa terakhir ini. Penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas sebenarnya telah terjadi sebelum ditemukannya teknologi modern untuk mencegah konsepsi dan penemuan obat-obatan untuk melawan atau mencegah penyakit. Dari penelitian sejarah di negara-negara Eropa dan Amerika dapat diungkap dua faktor penting yang ikut bertanggung jawab dalam penurunan mortalitas pada saat itu, yaitu: a) perbaikan kondisi lingkungan, dan b) peningkatan pengetahuan tentang penyebab penyakit serta peningkatan perilaku pencegahan penyakit. Untuk penurunan fertilitas sebelum teknologi kontrasepsi modern ditemukan, penundaan usia kawin dan abortus tak legal diduga menjadi penyebab utama mulai menurunnya fertilitas.

Proses transisi demografi mempunyai beberapa implikasi penting di dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, terjadinya perubahan yang cepat tentang jumlah, struktur, dan komposisi penduduk selama proses transisi demografi mempengaruhi perencanaan kesehatan secara

langsung sehingga subjek yang perlu dilayani akan berubah-ubah menurut pola fertilitas dan mortalitas pada saat itu.

Pada awal proses transisi demografi pertumbuhan penduduk sangat cepat sehingga jumlah yang memerlukan pelayanan kesehatan akan meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun. Karena perubahan struktur umur tersebut, pada fase awal proses transisi demografi lebih banyak anak-anak yang perlu memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian juga masalah komposisi, sangat mungkin masalah-masalah kesehatan wanita lebih menonjol, utamanya berhubungan dengan proses kehamilan dan kelahiran.

Pada akhir proses transisi demografi, yaitu pada saat angka kematian dan kelahiran sudah rendah, jumlah yang memerlukan pelayanan kesehatan setiap tahunnya tidak meningkat secara mencolok. Dipandang dari struktur umumnya, penduduk yang memerlukan pelayanan tidak akan didominasi oleh anak-anak dan wanita, tetapi lebih banyak dijumpai penduduk dewasa dan lanjut usia.

Pada saat transisi demografi berakhir, masalah yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan akan lebih mudah dilaksanakan. Pada pasca transisi demografi akan terjadi pertumbuhan penduduk yang seimbang (PTS), dan bilamana angka kelahiran dan kematian yang rendah dapat bertahan cukup lama, akhirnya akan tercapai kondisi penduduk tanpa pertumbuhan (PTP). Dalam hal ini tingginya angka kelahiran akan sama dengan angka kematian. Di Indonesia,

kondisi penduduk tumbuh seimbang baru akan terjadi sekitar tahun 2010-2015, sedangkan PTP diperkirakan baru akan terjadi sesudah pertengahan abad ke-21.

Meskipun konsep kesehatan berkaitan langsung dengan peristiwa kematian, implikasi transisi demografi pada sektor kesehatan selama proses berlangsung sangat tergantung pada penurunan tingkat fertilitas dan kurang dipengaruhi oleh penurunan mortalitas. Oleh karena penurunan fertilitas lebih menentukan jumlah kematian menurut umur, hal ini akan berkaitan langsung dengan struktur penyebab kematian. Fenomena ini yang dikenal dengan momentum penduduk, yang justru harus memperoleh perhatian yang selayaknya dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.

- **Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin kesejahteraan umat manusia secara adil dan merata antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan perlu dipertimbangkan dan dikelola sedemikian rupa agar keterkaitan antara penduduk, sumber daya, lingkungan, dan pembangunan tercipta dalam suatu keseimbangan yang dinamis. Untuk menciptakan kondisi tersebut, perlu digariskan kebijaksanaan pembangunan yang tegas untuk menghindari pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Langkah yang amat penting lainnya ialah penyusunan

kebijaksanaan kependudukan agar penduduk dapat terpenuhi kebutuhannya sekarang dengan tanpa melakukan kompromi sehingga mengurangi kesempatan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap aktivitas individu, keluarga, masyarakat, dan negara berkaitan dengan perubahan penduduk, tingkat dan pola pemakaian sumber daya alam, kondisi lingkungan dan kualitas, serta kecepatan pertumbuhannya ekonominya. Tidak ada yang menyangkal bahwa banyaknya penduduk miskin seperti halnya ketidakmerataan pembangunan sosial dan antar-*gender* berpengaruh timbal balik dengan perubahan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk. Begitu pula pengaruh pola konsumsi dan produksi penduduk yang tidak berkelanjutan akan menyebabkan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini juga mendorong terjadinya ketidakmerataan pembangunan sosial sebagai akibat timbal balik antara pembangunan dan perubahan parameter demografis yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, segala upaya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perubahan penduduk dan lingkungan serta pengaruhnya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa melakukan kompromi dengan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pengertian pembangunan berkelanjutan dapat disoroti dari berbagai dimensi. Dalam konsep umum pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai berikut.

Sustainable development is development that meets the needs of

the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Salah satu dimensi yang disepakati ialah kaitan antara penduduk, lingkungan, dan pembangunan. Ada empat aspek pokok pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penduduk, lingkungan, dan pembangunan.

Pertama, pembangunan berkelanjutan mengenal tanggung jawab antar-generasi. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa kompromi harus mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kedua, konsep pembangunan berkelanjutan adalah menyangkut ketergantungan global dalam mempromosikan pendekatan integratif untuk menangani "krisis yang tak dapat dilepaskan" (*interlocking crises*) antara: pertumbuhan penduduk-konsumsi hasil pertanian-kecukupan bahan makanan; lingkungan-pengelolaan sumber daya alam; teknologi-industrialisasi; melek aksara-status wanita; dan sosial-institusi politik. Banyak contoh masalah yang perlu dipecahkan dari *interlocking crises* ini. Hujan asam di Canada dan USA, penggundulan hutan di Nepal dan Banjir di Bangladesh, pengungsi lingkungan (*environmental refugees*) dari Ethiopia ke Somalia adalah contoh-contoh ketergantungan tersebut di atas.

Ketiga, konsep keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh, ekspor hasil hutan mungkin akan berhasil meningkatkan penghasilan penduduk dan negara. Akan tetapi,

tanpa kebijaksanaan penebangan yang memperhitungkan keberlangsungan sumber daya alam, hal ini harus dibayar dengan penggundulan hutan, tanah menjadi sangat tandus dan kehilangan sumber daya alam untuk tahun-tahun yang akan datang.

Keempat, pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pembangunan yang bersifat jangka panjang dan bukan hanya mementingkan pembangunan jangka pendek. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dan program untuk jangka panjang harus dirinci dengan jelas. Bukan hanya masalah penduduk secara keseluruhan saja yang perlu direncanakan jangka panjang, tetapi kelompok wanita perlu memperoleh perhatian khusus.

Kebijaksanaan yang berkaitan antara penduduk, lingkungan, dan pembangunan tidak mudah untuk diimplementasikan. Ada beberapa alasan mengapa sulit membahas masalah tersebut. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, negara maju dengan konsumsi energi yang tinggi cenderung menyalahkan negara-negara sedang berkembang agar tidak mencemari dan merusak bumi. Di lain pihak mereka tidak konsisten dengan apa yang mereka lakukan sendiri. Sebagai contoh, Amerika Serikat menolak untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi pencemaran bahan bakar dari fosil, tetapi dalam waktu yang sama melakukan kritik pedas terhadap pembakaran hutan di Amazon dan pertumbuhan penduduk di Brasil yang sangat cepat. Dari contoh ini masih tampak bahwa masing-masing negara masih mempertahankan kepentingan masing-masing dan kurang menghiraukan kepentingan negara lain.

Kedua, isu masalah kependudukan masih menjadi sangat sensitif untuk beberapa negara, terutama yang menyangkut masalah pemakaian kontrasepsi dan aborsi. Padahal, masalah lingkungan juga tidak kalah sensitifnya bagi beberapa negara yang ekonominya sangat tergantung pada sumber daya alam.

Ketiga, agar perhatian kita terfokus pada suatu masalah, dalam implementasi program seringkali dibagi masalah dan pemecahannya secara sektoral. Tidak hanya masalah kependudukan yang dipisahkan secara sendiri dari pembangunan, tetapi juga masalah wanita cenderung disoroti terpisah. Padahal dengan luasnya masalah penduduk, lingkungan, dan pembangunan pendekatan sektoral tersebut akan menghabiskan waktu dan energi serta sumber dana dan daya yang ada.

Keempat, masih banyak negara yang percaya bahwa jika masalah ekonomi dapat dipecahkan, fertilitas akan menurun secara otomatis. Mereka tidak menolak keluarga berencana, tetapi mereka tidak melihat bahwa pelayanan keluarga berencana adalah berkaitan dengan masalah lingkungan dan pembangunan secara timbal balik. Pengendalian penduduk tidak dipandang sebagai kebijaksanaan kependudukan secara makro, tetapi pemberian kontrasepsi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga saja.

Pola Transisi Demografi dan Pembangunan Berkelanjutan - Transisi Demografi di Dunia

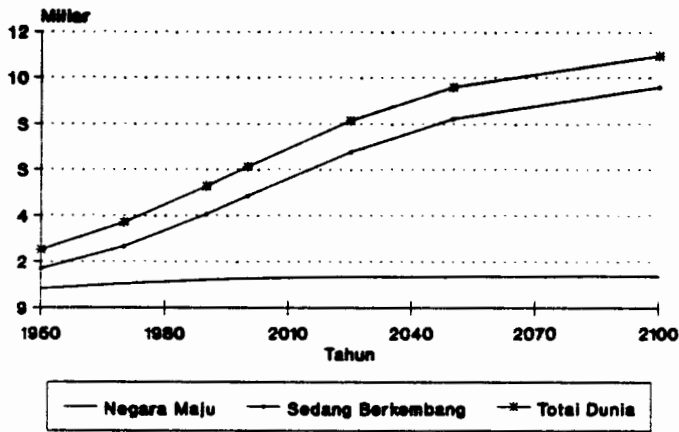
Angka laju pertumbuhan penduduk dunia periode 1990-1995 masih tercatat sekitar 1,57 persen per

tahun sehingga menghasilkan pertambahan penduduk sekitar 90 juta penduduk setiap tahunnya. Sampai tahun 2015, diperkirakan pertambahan jumlah penduduk tersebut akan terus meningkat melebihi 90 juta setiap tahunnya. Untuk periode 2020-2025 angka laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menurun menjadi 1,0 persen per tahun sehingga stabilisasi penduduk dunia masih diharapkan akan terjadi pada abad ke-21 nanti. Pada saat penduduk dunia masih sebanyak 1 miliar membutuhkan waktu 123 tahun untuk meningkat menjadi 2 miliar, dan penambahan satu miliar berikutnya memerlukan waktu berturut-turut 33, 14, dan 13 tahun. Sekarang penduduk dunia diperkirakan 5,716 miliar; dan transisi jumlah penduduk dunia dari 5 ke 6 miliar memerlukan waktu 11 tahun. Jumlah penduduk dunia baru akan mencapai 6 miliar pada tahun 1998. Dengan demikian, angka laju pertumbuhan penduduk yang semula sangat rendah meningkat mencapai puncaknya dalam dua dasawarsa terakhir ini dan sekarang telah berbalik untuk mulai mengalami penurunan.

Penduduk dunia diproyeksikan akan meningkat menjadi 11 miliar pada tahun 2100 (Gambar 1). Dari proyeksi tersebut tampak bahwa peningkatan jumlah penduduk negara-negara yang sudah maju hampir tetap mulai abad ke-21. Oleh sebab itu, secara relatif persentase penduduk negara maju akan berkurang.

Selama periode 1990-1995, kurang lebih 45 persen penduduk dunia tinggal di 114 negara dengan angka laju pertumbuhan penduduk lebih dari 2 persen per tahun. Ke 114 negara tersebut termasuk hampir seluruh

Gambar 1
Jumlah Penduduk Dunia dan Proyeksinya:
1950-2100



Sumber: The World Bank, 1994.

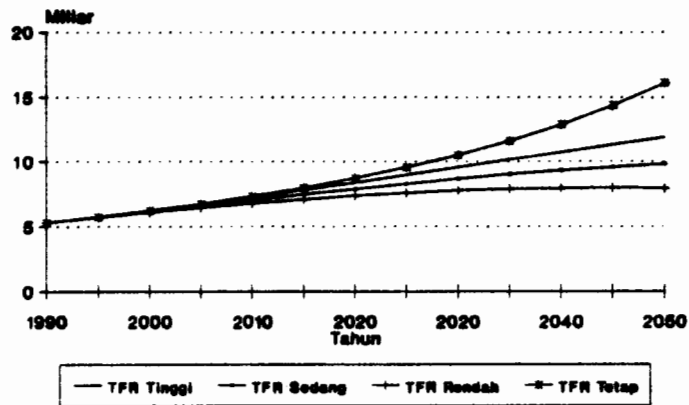
negara di Benua Afrika, dua pertiga penduduk Asia, dan sepertiga penduduk Amerika Latin. Negara-negara ini penduduknya akan berlipat dua kalinya hanya dalam waktu 24 tahun. Sebanyak 66 negara lainnya yang terdiri dari sekitar 23 persen penduduk dunia, terutama dari Eropa, mempunyai angka laju pertumbuhan penduduk di bawah 1 persen per tahun. Dengan angka laju pertumbuhan tersebut, 380 tahun dari sekarang penduduk Eropa akan berlipat menjadi dua kalinya.

Sebagian besar negara di dunia telah mengalami penurunan angka mortalitas dan fertilitas. Meskipun demikian, kecepatan dan waktu terjadinya penurunan tersebut berbeda-beda antarnegara, sehingga terjadi variasi yang sangat mencolok dalam pencapaian tingkat transisi demografinya. Pada periode 1990-1995, masih banyak negara-negara di Benua Afrika yang memiliki angka fertilitas di atas 7, misalnya Comoros, Ethiopia, Malawi, Somalia, Uganda, Angola,

Benin, Guinea, Cote d'Ivoire, Mali, dan Niger. Di Asia, hanya Yemen dan Qatar yang memiliki TFR masing-masing 7,6 dan 7,2, sedangkan Afganistan, Maldives, Laos, dan Pakistan memiliki TFR berturut-turut 6,90, 6,80, 6,69, dan 6,17. Pada periode yang sama (1990-1995), negara-negara Eropa memiliki TFR rata-rata sekitar 1,58, sedangkan untuk Asia masih sekitar 3. Meskipun demikian, di antara negara-negara di Asia, Hongkong, Jepang, dan Singapore memiliki TFR masing-masing 1,21, 1,50, dan 1,73.

Jikalau angka fertilitas penduduk dunia tidak mengalami perubahan (konstan), pada tahun 2050 saja penduduk dunia akan meningkat menjadi sekitar 17 juta (Gambar 2). Jumlah penduduk negara-negara yang sedang berkembang akan meningkat lebih pesat dibandingkan dengan peningkatan menurut pola fertilitas yang sekarang sedang berlangsung. Pengaruh berbagai alternatif penurunan tingkat fertilitas pada

Gambar 2
Proyeksi Jumlah Penduduk Dunia
dengan Berbagai Asumsi: 1990-2050



Sumber: World Population Prospects: The 1994 Revision.

perubahan jumlah penduduk dunia mendukung pernyataan ini.

Angka harapan hidup juga bervariasi antarnegara. Pada umumnya terjadi peningkatan angka harapan hidup waktu lahir dalam dua dasawarsa terakhir ini, kecuali "negara-negara dengan transisi ekonomi" yang justru menunjukkan penurunan angka harapan hidup. Pada kurun waktu 1990-1995, diperkirakan angka harapan hidup waktu lahir terendah dijumpai di Siera Leone (39 tahun) dan angka tertinggi di Jepang (79,5 tahun).

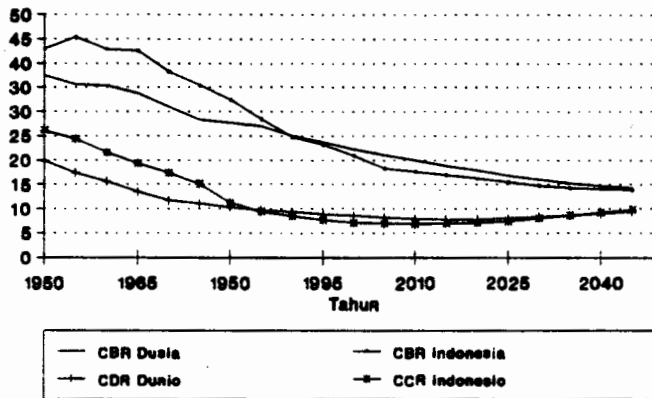
Angka kematian kasar dan kematian bayi juga bervariasi antarnegara. Pada kurun waktu 1990-1995, diperkirakan angka kematian kasar di atas 20 per 1000 penduduk ditemukan di beberapa negara Afrika, seperti Malawi, Guinea, Guinea Bissau, dan Siera Leone. Siera Leone ini mempunyai angka kematian kasar tertinggi, yaitu 25,2 per 1000 penduduk. Untuk Asia, Afganistan

mempunyai angka kematian kasar tertinggi, yaitu 21,8 per 1000 penduduk. Untuk angka kematian bayi, maka Siera Leone dan Afganistan memiliki angka kematian bayi inasing-masing 166 dan 163 per 1000 kelahiran hidup, sedang Jepang memiliki angka terendah, yaitu 4 per 1000 kelahiran hidup.

- Transisi Demografi di Indonesia

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada PJP-II akan sangat dipengaruhi oleh penurunan fertilitas dan mortalitas. Penurunan fertilitas ternyata lebih cepat dibandingkan dengan mortalitas. Pada Gambar 3 tampak bahwa proyeksi penurunan fertilitas dari tahun 1990 ke tahun 2020 hampir mencapai 40 persen. Pada periode yang sama, proyeksi angka harapan hidup waktu lahir hanya meningkat 17 persen. Perlu dicatat bahwa pola penurunan ini sebenarnya bervariasi antarpropinsi dan lebih cepat dibandingkan dengan penduduk dunia.

Gambar 3
Tren Penurunan Angka Kelahiran dan
Kematian Kasar: 1950-2050



Sumber: The World Population Prospects: The 1994 Revision.

Jumlah absolut wanita usia subur (15-49 tahun) di Indonesia akan meningkat relatif lebih cepat selama 20-30 tahun yang akan datang karena dampak *population momentum* atau momentum penduduk. Jikalau pada tahun 1990 jumlah wanita usia subur (15-49 tahun) berkisar 46 juta, pada tahun 2020 jumlahnya menjadi 71 juta. Jadi perubahan jumlah penduduk menurut umur sangat penting untuk diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan kesehatan.

Pada Gambar 4 disajikan proyeksi penduduk usia bawah lima tahun (balita) dan usia lanjut (60 tahun ke atas) di Indonesia. Akibat penurunan fertilitas, tampak bahwa usia balita relatif menurun dan kemudian menetap mulai tahun 2010-an, tetapi penduduk usia lanjut tetap bertambah jumlahnya secara linier. Ini menunjukkan bahwa turunnya fertilitas akan berpengaruh terhadap penurunan penduduk usia anak-anak secara langsung. Di lain pihak, dengan

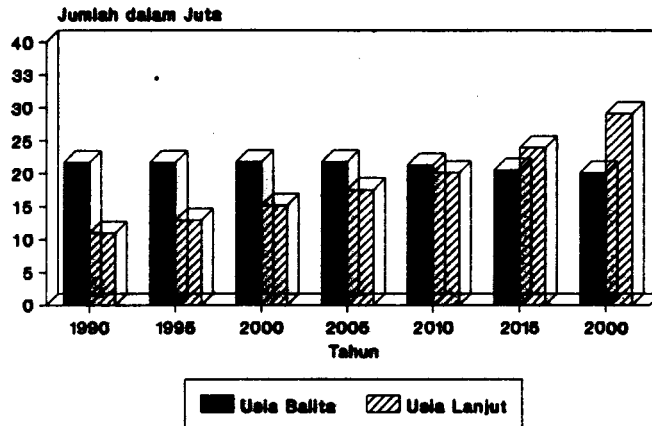
meningkatnya harapan hidup untuk seluruh umur maka kelompok usia lanjut akan bertambah terus, meskipun *Net Reproduction Rate* (NRR) telah mencapai satu antara tahun 2005-2010.

Meskipun tidak terjadi perubahan pola morbiditas menurut umur, penurunan fertilitas berpengaruh secara langsung pada struktur umur, sehingga mempengaruhi frekuensi relatif dari berbagai jenis penyakit. Karena penduduk mengalami proses menua, dapat diperkirakan bahwa jumlah penderita penyakit kronis usia dewasa dan lanjut akan menjadi dua kali lipat dari penyakit infeksi pada anak-anak karena pada akhir PJP-II jumlah penduduk usia lanjut berlipat hampir tiga kali dari tahun 1990.

- Sasaran Demografis
 - Sasaran Kuantitatif Program Aksi Kependudukan Kairo

Secara kuantitatif objektif, Konperensi Kairo diarahkan pada 5

Gambar 4
 Proyeksi Penduduk Usia Balita dan
 Usia Lanjut di Indonesia: 1990-2020



bidang sasaran pokok: 1) tercapainya pertumbuhan ekonomi yang senantiasa meningkat dalam konteks pembangunan berkelanjutan, 2) pencapaian pendidikan secara universal, utamanya untuk wanita, 3) persamaan dan pemerataan menurut *gender*, 4) penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, dan 5) pemberian akses pelayanan kesehatan reproduksi yang universal, termasuk di dalamnya pelayanan keluarga berencana dan kesehatan seksual. Pencapaian sasaran tersebut diarahkan agar tercapai stabilitas penduduk dunia, yang berkaitan pula dengan perbaikan dalam hal konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Secara kuantitatif, angka harapan hidup penduduk pada negara dengan angka kematian tinggi akan ditingkatkan menjadi 65 pada tahun 2005 dan 70 pada tahun 2015, sedang untuk negara dengan angka kematian

rendah ditingkatkan menjadi 70 pada tahun 2005 dan 75 pada tahun 2015. Untuk angka kematian bayi, tujuan yang hendak dicapai pada *World Summit for Children* tahun 1990 akan tetap dipertahankan. Dalam hal ini angka kematian bayi pada tahun 2000 harus lebih rendah dari 50 dan angka kematian anak harus lebih rendah dari 70 per 1000 kelahiran; atau secara kualitatif maka angka kematian bayi dan anak pada tahun 2000 diturunkan menjadi separo dari kondisi tahun 1990. Selanjutnya pada negara dengan kematian sedang, angka kematian bayi pada tahun 2005 harus lebih rendah dari 50 dan kematian anak lebih rendah dari 70 per 1000 kelahiran. Pada semua negara diharapkan pada akhir tahun 2015 telah memiliki angka kematian bayi di bawah 35 dan angka kematian anak di bawah 45 per 1000 kelahiran.

Angka kematian maternal (AKM) merupakan indikator kuantitatif yang berkaitan dengan program-program kesehatan reproduksi dan program-

program untuk menampilkan wanita. Dari Program Aksi Kependudukan tahun 1994 disepakati agar AKM untuk tahun 2000 diturunkan menjadi separo dari tingkat kematian pada tahun 1990, dan pada tahun 2015 diturunkan menjadi separonya dari tingkat kematian pada tahun 2000. Secara kuantitatif untuk semua negara diharapkan mempunyai AKM kurang dari 125 pada tahun 2005 dan kurang dari 75 per 100 000 kelahiran pada tahun 2015. Bagi negara-negara dengan angka kematian sedang, maka AKM diharapkan turun menjadi di bawah 100 pada tahun 2005 dan 60 per 100 000 kelahiran pada tahun 2015. Untuk semua angka-angka kuantitatif tersebut di atas perlu diupayakan mengurangi diferensial angka-angka kuantitatif tersebut, baik menurut *gender*, geografis, tingkat sosial-ekonomis, etnis, dan antara penduduk asli dan pendatang.

- Sasaran Kuantitatif Repelita VI

Secara umum, tujuan kuantitatif tersebut sejalan dengan apa yang hendak dicapai dalam Repelita VI. Misalnya, pada akhir tahun 1990 angka harapan hidup waktu lahir dapat dinaikkan dari 62 pada akhir tahun 2020 menjadi 71,2 tahun. Angka kematian bayi akhir tahun 1990 adalah 60,7 diharapkan menurun menjadi 23,9 tahun per 1000 kelahiran pada akhir tahun 2020. Meskipun demikian, khusus untuk AKM agaknya memerlukan upaya-upaya khusus karena harus diturunkan sedikit lebih rendah dari apa yang hendak kita capai. Pada buku Repelita VI, AKM akhir Repelita VI diperkirakan akan

diturunkan dari 225 menjadi 80 per 100.000 kelahiran akhir PJP II. Oleh sebab itu, tanpa upaya terobosan baru dalam bidang kesehatan reproduksi dan bidang lain yang terkait, akan sulit untuk mencapai sasaran AKM yang telah disepakati bersama tersebut. Hal ini mempunyai implikasi bahwa pengadaan dari pemerataan bidan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat perlu segera dilaksanakan, agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Dibandingkan dengan kesepakatan Program Aksi Kependudukan sebelumnya, program ini mencakup aspek yang lebih luas. Masuknya isu keluarga dalam bab tersendiri dan semakin menonjolnya isu pembangunan untuk kepentingan wanita (termasuk hak-hak reproduksi dan seksual yang akan lebih dijamin) diharapkan akan memberikan hasil yang lebih efektif dan meningkat dengan cepat. Misalnya, wanita adalah sasaran pembangunan yang relatif tertinggal dibandingkan dengan pria karena wanita terbukti memiliki tingkat pendidikan, penghasilan, dan jenis pekerjaan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki. Oleh sebab itu, menutup kekurangan tersebut berarti mempercepat laju pembangunan dengan menutup *gap* yang selama ini terjadi.

Di samping upaya mengentaskan wanita dari posisinya agar menjadi lebih berpendidikan dan lebih berpenghasilan, memfokuskan pembangunan pada wanita akan mempunyai dampak tidak langsung, yaitu menurunkan tingkat fertilitas wanita. Dengan demikian, upaya pengendalian dan pengaturan

kelahiran akan lebih kuat, yang akhirnya akan mempercepat penurunan laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini berkaitan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi.

- Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Global dan Nasional

Sasaran pembangunan berkelanjutan secara global tertuang pada Deklarasi Rio dan juga pada Program Aksi Kependudukan hasil Konferensi Kependudukan Internasional di Kairo. Meskipun demikian, pada bagian ini akan dibahas sasaran yang berasal dari Program Aksi Kependudukan 1994. Untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, akan dibahas strategi yang dijabarkan dari GBHN 1993 dan juga dari kebijaksanaan lainnya.

• Program Aksi Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam Program Aksi Kependudukan 1994, hubungan antara penduduk, pertumbuhan ekonomi yang berlanjut dan pembangunan berkelanjutan disoroti menurut 3 bagian penting. Bagian pertama menyoroti pentingnya untuk mengintegrasikan kependudukan dalam strategi pembangunan; bagian kedua memfokuskan pada keterkaitan antara penduduk, pertumbuhan ekonomi yang berlanjut, dan kemiskinan; sedang bagian ketiga membahas keterkaitan antara penduduk dan lingkungan.

Dalam mengintegrasikan masalah-masalah kependudukan dalam strategi kependudukan umumnya, Program

Aksi Kependudukan menyerukan agar kependudukan diintegrasikan sepenuhnya pada semua strategi pembangunan, perencanaan, pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya dan dana. Upaya ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk sekarang dan generasi yang akan datang. Di samping itu, semua masalah kependudukan perlu diintegrasikan pada seluruh aspek pembangunan untuk mempromosikan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengintegrasikan faktor kependudukan dalam pembangunan, perlu ditempuh berbagai langkah yang konstruktif pada setiap jenjang pengambilan keputusan. Integrasi tersebut harus mencakup sasaran jangka panjang dan pendek serta perlu dievaluasi pelaksanaannya secara berkala, termasuk implikasi jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta konsekuensinya pada dinamika penduduk beserta pola produksi dan konsumsinya. Lembaga pemerintah serta lembaga dan organisasi swadaya masyarakat dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan perlu mempertimbangkan tingkat pencapaian dan perkembangan kependudukan serta memperhatikan peningkatan kualitas hidup penduduk. Oleh sebab itu, dianjurkan agar setiap negara mempunyai institusi yang dapat mengawasi terjaminnya pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Di samping itu, perlu peningkatan komitmen politik agar dana dan sarana yang ada dialokasikan secukupnya, termasuk

untuk keperluan memperkuat institusi dan penelitian dalam bidang ini.

Dalam kaitan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, perlu diperhatikan upaya pokok dalam peningkatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta menurunkan pola konsumsi dan produksi yang kurang berkelanjutan. Perhatian khusus perlu diberikan pada kelompok wanita miskin di negara yang sedang berkembang. Mereka perlu dibebaskan dari diskriminasi serta hambatan-hambatan lain yang bersifat sosial, kultural, politis, dan ekonomis.

Keterkaitan penduduk dan lingkungan telah dibahas dalam Agenda 21 di Rio. Meskipun demikian, dalam Program Aksi Kairo masih ditekankan lebih lanjut bahwa penanganan penduduk miskin masih harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena kemiskinan adalah salah satu penyebab perusakan lingkungan. Oleh sebab itu, rekomendasi Program Aksi Kependudukan menekankan upaya pengentasan kemiskinan. Ditekankan pula pentingnya untuk mempertimbangkan faktor demografi dalam pembangunan, di samping untuk keperluan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Peran wanita dalam pengelolaan lingkungan perlu ditingkatkan, termasuk peran wanita dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.

- **Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditempuh melalui tiga

dimensi utama. Dimensi pertama ialah memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan mutu hidup dan menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang semakin meningkat. Kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya partisipasi wanita. Ketiga, melakukan pencegahan, perlindungan, dan konservasi terhadap pengrusakan lingkungan, termasuk pencegahan terhadap pencemaran lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan perlindungan terhadap lingkungan merupakan resep utama untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tiga faktor tersebut mempunyai interaksi yang sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan persediaan sumber dana untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan masalah lingkungan. Pemerataan pembangunan memperkuat dasar untuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan adalah salah satu faktor pendorong terjadinya perusakan lingkungan. Perlindungan lingkungan mendukung efisiensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta memberikan benefit yang lebih banyak bagi penduduk miskin karena penduduk miskin adalah yang paling besar merasakan dampak pengrusakan lingkungan.

Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan selalu menjadi perdebatan penting. Pilihan tidak harus diputuskan antara pencemaran lingkungan atau penurunan produksi industri. Akan tetapi, jawabannya adalah alternatif teknologi lain sehingga meningkatnya produksi industri, tetapi tanpa pencemaran lingkungan. Dalam kaitan ini, perlu kebijaksanaan integratif yang sangat efisien agar tidak terjadi pertentangan kepentingan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, telah disadari bahwa proses pembangunan di Indonesia tidak hanya bertumpu pada keadaan atau masalah yang sedang dihadapi sekarang atau dalam waktu dekat, tetapi juga permasalahan yang berwawasan jangka panjang. Meskipun demikian, pertentangan kepentingan tiga unsur tersebut tidak dapat dihindari sama sekali. Berikut adalah tiga pengalaman utama Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada tiga dimensi tersebut.

Pertama, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 6-7 persen per tahun akan dipertahankan, meskipun angkatan kerja akan meningkat sekitar 2,3 juta setahun dan ekspor harus lebih mengandalkan komoditi nonminyak bumi. Untuk itu, pertama, akan ditempuh pergeseran proses ekonomi secara kualitatif, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi; dan, kedua, perlu dilakukan pergeseran dari sudut

kuantitas ke kualitas barang-barang ekspor dan pelayanan jasa yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan orientasi ini akan menjadi lebih terjamin apabila dilakukan pula transformasi struktural yang mengubah pola pertumbuhan ekonomi, yaitu: meningkatkan peran sektor swasta, menurunkan peran minyak bumi dalam perekonomian, serta pergeseran antar dan inter sektor dalam perekonomian yang tidak tergantung minyak.

Kedua, pemerataan pembangunan melalui peningkatan dan partisipasi penduduk dalam pembangunan. Hal ini ditempuh terutama melalui tiga aspek berikut: melanjutkan upaya pengentasan kemiskinan; memperluas partisipasi penduduk dalam pembangunan regional; dan mempromosikan wawasan yang lebih luas tentang peran swasta dalam pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, perlindungan lingkungan agar sumber daya alam tetap dapat dikonservasi dan dicegah dari pencemaran yang merusak lingkungan. Hal ini penting karena hampir 40 persen *Gross Domestic Product* (GDP) bersumber dari pengolahan langsung sumber daya alam. Dilain pihak, urbanisasi meningkat dengan cepat dan pertumbuhan penduduk di perkotaan lebih dari 2 kali pertumbuhan di pedesaan. Oleh sebab itu, pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat langsung dari penambahan jumlah penduduk di perkotaan akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang baru. Jikalau pada akhira Pembangunan Jangka Panjang ke II penduduk urban diperkirakan menjadi sekitar separo

dari penduduk Indonesia, masalah tersebut perlu mendapat penanganan yang memadai.

Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, salah satu studi dari Bank Dunia menekankan pentingnya penanganan makro ekonomi yang lebih komprehensif, khususnya dalam memelihara stabilitas finansial, memobilisasi sumber-sumber domestik, dan mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Ditekankan pula perlunya penghematan dalam sektor publik dan swasta agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Dalam kaitannya masalah insentif dan disinsentif, maka perlu diperluas kesempatan kompetisi dalam pemberian insentif antara sektor swasta dan pemerintah sehingga saling kompetitif. Dalam hal ini perlu pula dipikirkan agar masalah insentif dalam pengelolaan lingkungan menjadi pertimbangan kebijaksanaan publik yang diambil. *Investment* dalam bidang sumber daya manusia mempunyai nilai yang unggul, di samping diperlukan *investment* lain, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Semua ini hanya akan berjalan lebih baik apabila perhatian khusus terhadap institusi pemerintah lebih diperhatikan, utamanya dalam memacu mekanisme pasar dan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan merata, termasuk dalam perlindungan lingkungan.

Kesimpulan

Kebijaksanaan kependudukan mencakup segala upaya untuk mempengaruhi variabel demografis,

menentukan target demografis yang ingin dicapai dan memformulasikan upaya untuk mempengaruhi jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. Dalam hal ini, kebijaksanaan tersebut kait-mengkait dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, secara sadar harus digariskan bahwa kebijaksanaan kependudukan yang diambil adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kebijaksanaan tersebut akan menjadi semakin nyata dampaknya bagi negara kita, apabila masalah keterkaitan antara lingkungan dan penduduk juga dilaksanakan seperti apa yang dianjurkan dalam Program Aksi Kependudukan. Sisi yang perlu dilaksanakan sebagai hasil kesepakatan ini antara lain menjawab pertanyaan kepada kita semua, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Memfokus faktor kependudukan sebagai biang keladi permasalahan lingkungan saja tidak menyelesaikan ancaman yang ada, tetapi yang perlu adalah memanfaatkan potensi penduduk dan keluarga untuk melindungi dan memanfaatkan lingkungan sebaik-baiknya.

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, transisi demografi perlu diikutsertakan dalam semua aspek kebijaksanaan karena berkaitan secara timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Arah kebijaksanaan pemerintah Indonesia untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan pembangunan, dan pemeliharaan lingkungan perlu diteruskan karena

sesuai dengan kebijaksanaan Program Aksi Kependudukan secara global. Meskipun demikian, tidak semua sasaran kuantitatif sebagai indikator pembangunan berkelanjutan akan

dapat berhasil seperti yang diinginkan karena apa yang terjadi pada karakteristik demografi masa lalu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi pada masa depan.

Daftar Pustaka

- Barlow, R. 1994. "Population growth and economic growth: some more correlations", *Population and Development Review*, 20(1): 153-165.
- Biro Pusat Statistik. 1993. *Proyeksi Penduduk Indonesia: 1990-2020 (Draft)*. Jakarta.
- Demeny, P. 1968. "Early fertility decline in Austria-Hungary: a lesson in demographic transition", *Deadelus*, (97): 502-522.
- Leisure, J.W. 1962. *Factor involved in the decline of fertility in affair: 1990-1950*. Doctoral dissertation at Princeton University.
- Omran, Abdel R. 1971. "The epidemiologic transition: a theory of the epidemiology of population change", *Milbank Memorial Fund Quarterly*, 49(4, pt. 1): 509-538.
- Speidel, J.J. 1993. *Statement to the second preparatory committee meeting for the international conference on population and development*. Washington, D.C.: Population Action International.
- Smil, Vaclav. 1994. "How many people can the earth feed", *Population and Development Review*, 20(2): 255-292.
- Szreter, S. 1993. "The idea of demographic transition and the study of fertility change: a critical intellectual", *Population Development Review*, 19(4): 659-701.
- United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. 1994a. *World Population Prospects: the 1994 revision*. New York.
- United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. 1994b. *World citizenship a global ethnic sustainable development*. New York.
- United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. 1994c. *Population policy: frame work for assistance in the population sector*. New York.
- United Nations. Department of International Economic and Social Affairs. 1994d. *Programme of Action of the united international conference on population and development*. New York.
- United Nation. Fund for Population Activities. 1993. *Population in the 21st century*. New York.
- Waak, P. 1991. *Population policy: social realities, prospects and the three ecos*. Washington, D.C.: National Audubon Society.
- The World Bank. 1994. *Population and development: implication for the World Bank*. Washington, D.C.